

004

PSIKOLOGI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Adrianus Meliala
Universitas Indonesia, Jakarta

Abstrak

Sebagai ilmu dan sebagai keahlian profesi, psikologi di Indonesia tidak memiliki akses dan andil yang luas dalam pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Hal ini berbeda dengan situasi di negara-negara barat. Tulisan ini menganjurkan agar psikolog serta pemerhati psikologi mencoba masuk lebih dalam di bidang ini.

Kata Kunci: psikologi, kebijakan, kebijakan publik, Indonesia

Pendahuluan

Psikologi secara tradisional memiliki fokus amatan, yang lalu menciptakan kompetensinya, dalam konteks lingkungan-lingkungan utama seseorang. Dengan definisi tersebut, maka yang disebut 'domestik' adalah masalah seputar rumah tangga, sekolah dan pekerjaan/karier/profesi. Itulah lingkungan-lingkungan utama kebanyakan orang yang cenderung disorot oleh psikologi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan masalah-masalah non-domestik? Benarkah tidak ada problem dan solusi psikologis untuk masalah di level tersebut?

Atau, mungkinkah terdapat ketidakcukupan kemampuan analitis yang memang diduga terdapat secara fundamental dari teori-teori psikologi untuk mengupas masalah-masalah non-domestik?

Untuk mudahnya, masalah-masalah non-domestik dapat dibagi dua: masalah-masalah yang berada pada tataran masalah yang khas, praktis dan spesifik serta masalah yang berada di tataran publik. Terhadap masalah yang tergolong khas, praktis

persoalan-persoalan domestik. Biasa dimengerti dengan sebutan 'masalah domestik' adalah masalah-masalah di tingkat hubungan interpersonal dalam dan spesifik tersebut, katakanlah menyangkut masalah perekonomian atau kesenian, maka hubungan dengan psikologi menjadikan lahirnya sebutan "psikologi terapan" yakni keterlibatan psikologi yang ditujukan untuk pemecahan masalah dalam bidang tertentu-tertentu.

Suatu masalah dikatakan berada di tataran publik apabila permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak (sehingga disebut pula sebagai masalah makro). Atau, dalam bahasa Ullmann *et al.* (1984; vii), "...decisions about the allocation of limited resources."

Perkembangan kemudian memperlihatkan, keputusan maupun pengelolaan atas implikasi suatu keputusan perlu mengacu pada suatu pola ideal tertentu. Pola ideal tersebut adalah sejauh mana suatu masalah publik menunjukkan kondisi tata pemerintahan yang baik (atau *good governance*) dalam pengelolaannya,

yang dapat diukur dari apakah setiap permasalahan yang muncul dikelola dan dicarikan solusi secara transparan, efisien, taat hukum, tidak diskriminatif, adil, sensitif gender demikian pula berbagai indikator kondisi tata pemerintahan yang baik lainnya.

Makalah ini untuk selanjutnya memfokuskan diri pada bagaimana psikologi, khususnya psikologi sosial, berkontribusi pada terpecahkannya permasalahan di tingkat makro, yang lalu membutuhkan aneka kebijakan publik sebagai alat atau *tools* dalam rangka upaya intervensinya. Kebijakan publik di sini, tidak hanya perlu untuk dibuat secara taat prosedur, tetapi juga perlu dijalankan secara tepat guna dan, pada akhirnya, dapat dimonitor untuk dikaji ulang.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, telah disebutkan bahwa adalah psikologi sosial sebagai cabang dalam psikologi yang memang paling besar kemungkinannya untuk berkontribusi dalam arena pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik di berbagai masalah makro.

Hal ini semakin terlihat relevansinya khususnya ketika psikologi sosial tersebut tidak lagi memfokuskan diri pada unit-unit analisa yang domestik (seperti hubungan-hubungan interpersonal dalam setting lingkungan-lingkungan utama seseorang), melainkan telah fasih berkiprah dalam konteks kemasyarakatan atau bahkan bangsa dan negara, ketika itulah kontribusi dapat berlangsung maksimal.

Justifikasi

Bila dikatakan "kebijakan publik", maka terdapat minimal dua kondisi yang akan selalu muncul yakni terdapatnya pilihan kebijakan (*policy choices*) yang menyangkut sektor publik (*public sector*) (Walker, 1994). Pendefinisian perihal apa itu sektor publik, kemungkinan dapat dilihat dari betapa awal dan akhir dari kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam berbagai levelnya, kebijakan publik itu terdapat dan ditindaklanjuti dengan apa yang disebut penerapan kebijakan (*policy implementation*) entah dalam bentuk strategi, program maupun kegiatan, demikian pula analisis terhadap kebijakan (*policy analysis*).

Sejara muncul kemudian suatu pertanyaan mendasar, walaupun bisa dan mungkin, mengapa psikologi (lebih khusus lagi psikologi sosial) perlu ikut berkiprah dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan publik?

Jawaban yang dapat diajukan untuk menjustifikasi keperluan tersebut berada di level sains, level strategis dan level empiris .

Yang dimaksudkan dengan terdapatnya pembenaran di level sains mengenai kiprah psikologi dalam kebijakan publik adalah karena bidang kebijakan publik menghadirkan berbagai situasi yang kemudian dapat diamati (*observable*) dan dapat diintervensi (*interventable*) melalui suatu pendekatan ilmiah. Situasi-situasi tersebut adalah perihal efek, pengaruh, hubungan antar berbagai hal, demikian pula upaya-upaya terhadap dapat atau tidak dapat dilakukannya sesuatu hal, keberlangsungan/ ketidakberlangsungan, hal-hal yang menghambat/ mendorong dan seterusnya. Pada dasarnya, hal-hal itu pulalah yang merupakan premis dasar suatu permasalahan ilmiah.

Dengan demikian, praktis, semua kebijakan publik sebenarnya dapat didekati dan dianalisis secara keilmuan. Atau sebaliknya, kebijakan publik dapat dibangun dan dimodifikasi berdasarkan temuan serta teori-teori ilmiah. Berkaitan dengan itu semua, psikologi adalah salahsatu saja dari berbagai ilmu yang mampu meng-engage persoalan-persoalan kebijakan publik.

Justifikasi pada level strategis berkaitan dengan sejauhmana keyakinan kita terhadap cara-cara yang

lebih menjamin keberhasilan dalam suatu upaya intervensi dan cara-cara lain yang diketahui lebih kurang menjamin. Dengan berkonsentrasi pada pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik melalui cara-cara yang terbaik, kita dapat harapkan suatu upaya intervensi berskala makro yang tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi ketimbang bila diupayakan program-program intervensi di level kasus atau level kelompok (kasus-kasus) dengan karakteristik yang sama. Saat terdapat hambatan (*constraint*) waktu, sumber daya serta anggaran yang terbatas, maka upaya menjangkau keluar (*outreach*) dari perspektif keilmuan dalam hal kebijakan publik amat mungkin merupakan alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah.

Terakhir, perihal justifikasi pada level empiris, hanya berkisar pada bahwa memang telah banyak psikolog atau pengamat psikologi yang menjadi pengamat dan "pemain" dengan mempergunakan keilmuannya terutama di luar negeri.

Situasi luar negeri

Khususnya situasi di Amerika Serikat, dapat kita jadikan sebagai benchmark atau tolok ukur seberapa jauh psikologi telah dapat memasuki area kebijakan publik.

Dapat disebut yang diuraikan oleh Allen (1978), bahwa sejak tiga dekade lalu telah terdapat psikolog yang mempelajari meneliti efektifitas *airbag* sebagai pencegah kecelakaan bagi penumpang mobil, psikolog yang bekerja di parlemen, psikolog yang meminati studi anti rokok, psikolog yang menganalisa pergerakan harga saham dan sebagainya. Bahkan kini telah terdapat jurnal-jurnal yang jelas-jelas menyebutkan hubungan psikologi dan kebijakan publik, salah satu yang paling prestisius adalah jurnal "*Psychology, Public Policy and Law*" milik American Psychological Association (APA).

Brigham & Brown (1980; 7) juga menyebutkan bahwa sejak dekade tersebut pula dunia kebijakan publik tidak lagi menggantungkan diri pada kebijakan berbasis ancaman (*penalty*) maupun pemberian rangsangan (*incentives*). Dengan kata lain, terdapat kebijakan-kebijakan yang semakin kaya dalam menggunakan berbagai prinsip & teori psikologi.

Walau demikian, Ullmann *et al.* (1984; vii-x) menyebutkan, walau terdapat begitu banyak penelitian psikologis yang terkait dengan kebijakan publik, hubungan antara keduanya (khususnya dengan pembuat kebijakan – *policy makers*), sebenarnya tidak seimbang.

Psikolog yang ingin masuk dalam arena ini harus menyadari kecenderungan para pembuat kebijakan untuk mem-filter-isasi informasi dan kemudian mempergunakannya untuk kepentingan politis ataupun pribadi. Demikian pula halnya bila yang membiayai penelitian psikologis terkait dengan kebijakan publik tertentu adalah politisi atau pimpinan perusahaan. Hal ini berbeda bila kepentingan suatu penelitian adalah dalam rangka mencari suatu fakta ilmiah belaka.

Konstatasi Ullmann *et al.* tersebut sejalan dengan pandangan Pettigrew (1985; 121-135) yang menyebutkan lima hal:

1. Hubungan antara kebijakan dan ilmu sosial (termasuk diantaranya psikologi) relatif baru. Hubungan tersebut masih akan terus berevolusi. Ilmu sosial akan amat kesulitan menyesuaikan diri berkaitan dengan pembentukan petunjuk etis bagi *policy-related research*
2. Ilmu sosial jarang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara langsung. Insitusi lain seperti lembaga donor dan media massa dapat melakukan mediasi

3. Ada perbedaan tajam diantara berbagai ilmu-ilmu sosial berkaitan dengan kemungkinan diterimanya rekomendasi ilmiah oleh kebijakan.
4. Terdapat perbedaan tajam pula diantara berbagai lembaga serta berbagai tingkatan dalam pemerintahan guna menerima kontribusi keilmuan
5. Petunjuk etis bagi riset kebijakan amat diperlukan seiring dengan semakin banyaknya bidang yang diteliti oleh psikologi.

Situasi empiris

Walau telah diargumentasikan betapa terdapat justifikasi dari psikologi untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik, tidak demikian halnya dengan kenyataan empiriknya di Indonesia. Di sini, psikologi (khususnya psikologi sosial) hampir tidak dikenal masukan-masukannya.

Seraya mengatakan ini, akan diperlihatkan dua bentuk lingkungan (*environment*) pembuatan kebijakan publik. Lingkungan pertama adalah lingkungan dalam atau lingkungan yang langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan publik tertentu. Tentu saja, terdapat posisi (*seat*) dan kesempatan yang terbatas untuk dapat berada di dalam lingkaran dalam (*inner circle*) pengambilan kebijakan ini.

Wujud dari lingkungan pertama tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Adanya psikolog yang menjadi pejabat publik
2. Adanya psikolog yang menjadi penasehat/konsultan/tim pakar/staf ahli/deputi dari pejabat publik tertentu
3. Adanya niat, dorongan atau perintah dari berbagai pihak untuk membentuk kebijakan publik yang berangkat dari, memperhatikan atau bahkan mempergunakan pendekatan psikologi.

Suatu keuntungan berada di lingkungan dalam pembuatan kebijakan publik adalah adanya kans yang relatif lebih besar agar niatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan muatan-muatan psikologi akhirnya berhasil.

Wujud dari lingkungan kedua adalah lingkungan luar atau lingkungan yang tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Wujudnya adalah sebagai berikut:

1. Menulis artikel, membuat pernyataan pers atau mengadakan wawancara untuk media-massa.
2. Mengadakan penelitian demikian pula berbagai kegiatan ilmiah
3. Mengadakan kegiatan lobbying dengan pihak-pihak yang secara langsung dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik ; dan lain-lain

Praktis, siapa saja bisa masuk dalam lingkungan luar ini dan mengambil satu dari beribu peran yang cocok baginya. Suatu keuntungan berada di lingkungan luar tersebut adalah, adanya suatu posisi yang berjarak dengan pembuat kebijakan publik maupun pihak-pihak lain yang terkait atau yang menjadi obyek dari kebijakan publik tersebut. Dengan demikian, posisi netral atau imparial diperkirakan tetap muncul.

Sebaliknya, kerugian dari posisi tersebut adalah adanya berbagai kemungkinan yang dapat menjadikan dalam hal ini psikologi, tidak berhasil mempengaruhi kebijakan publik tersebut. Bila ketidakberhasilan tersebut diakibatkan tidak mumpuni-nya rekomendasi yang diusulkan, tentu saja tidak ada lagi persoalan.

Menjadi persoalan bila kegagalan mempengaruhi kebijakan berasal dari, sebagai contoh, ketidakkonsistenan dalam menyuarakan

isu (analisis tidak diajukan secara rutin), disampaikan dengan cara yang salah (melalui laporan resmi yang serius dan bukan dengan *executive summary* saja, ketidaktepatan strategi yang dipakai (apakah hendak menjadi kelompok penekan atau pelobby) dan sebagainya.

Berkaitan dengan lingkungan dalam tersebut, sekilas situasinya tidaklah menggembirakan. Hampir tidak ada psikolog yang berada dalam posisi pejabat publik. Kalaupun ada atau pernah ada, tetap bisa dikritisi apakah yang bersangkutan telah pernah mempergunakan jalan pikiran di atas dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tertentu. Demikian pula hampir tidak ada psikolog yang menjadi atau diundang menjadi konsultan, penasehat atau staf pejabat publik tertentu; hal mana memungkinkannya untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung.

Berkaitan dengan lingkungan luar, situasinya juga tidak terlalu ideal. Tidak banyak psikolog yang mampu menulis, membuat pernyataan pers atau cukup dikenal media massa guna diwawancarai. Akibatnya, upaya mempengaruhi atau membentuk opini publik melalui media, suatu hal yang amat strategis untuk dilakukan dewasa ini, tidak bisa secara optimal dilakukan. Kalaupun ada, maka persoalan seberapa konsisten hal itu dilakukan adalah hal yang lain lagi, mengingat psikolog yang relatif aktif sekalipun, seperti Fuad Hassan, Sarlito Wirawan Sarwono, Saparinah Sadli atau Darmanto Jatman, memiliki tugas utama yakni mengajar; hal mana menyebabkan mereka cukup sibuk.

Sejalan dengan itu, mereka yang aktif mengadakan penelitian, menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bertendensi mempengaruhi kebijakan publik juga tidak banyak; demikian pula mereka yang aktif mengadakan kegiatan lobbying. Diyakini kuat, jumlah pemerolehan grant penelitian ataupun kegiatan penelitian aksi (*action research*

activities) yang telah diperoleh fakultas-fakultas psikologi di Indonesia sama sekali tidak berkorelasi dengan banyaknya jumlah fakultas psikologi tersebut dan besarnya *student body* yang diasuh di berbagai fakultas tersebut.

Dapat diperkirakan, berkaitan dengan lemahnya kehadiran sosok mereka-mereka yang seharusnya berada di lingkungan dalam, demikian pula tidak aktifnya mereka-mereka yang berada di lingkungan luar, adalah sejalan dengan orientasi pendidikan tinggi psikologi dan komunitas psikologi di Indonesia yang lebih menekankan pada pengajaran (*teaching-heavy*) ketimbang penelitian (*research-heavy*) selain, tentunya, orientasi keilmiah dari psikologi itu sendiri yang cenderung meng-emoh-i masalah-masalah makro di tingkat kemasyarakatan.

Dipihak lain, sebagaimana dikeluhkan oleh beberapa kalangan psikolog, pihak-pihak yang tidak berada dalam posisi formal selaku psikolog, demikian pula yang diragukan pengetahuannya tentang psikologi, malah menyebut-nyebut dan mengkaitkan dirinya dengan psikologi. Sebagai contoh, mulai dari ekonom, artis bahkan pelawak ada yang mengatakan bahwa, secara psikologi, seharusnya yang dilakukan adalah A dan bukannya B. Atau, bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah A tetapi B. Apa yang diklaimnya menjadi bernilai strategis mengingat mereka mempergunakan medium televisi swasta.

Demikian pula, terdapat tajuk rencana berbagai harian dan majalah yang menganalisis adanya tekanan psikologis terhadap mulai dari harga saham, gejolak politik hingga kecenderungan kejahatan, tanpa merasa perlu berkonsultasi atau meminta advis dari para psikolog sekalipun.

Tentunya, klaim-klaim seperti ini, secara terbatas, dapat juga dianggap

sebagai indikasi telah meluasnya kesadaran akan peranan faktor kepribadian dan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai setting kehidupan.

Diluar itu semua, terdapat pula hal lain yang menghambat keikutsertakan psikologi dalam pembuatan kebijakan publik. Misalnya, kenyataan bahwa kebijakan, apalagi kebijakan sosial, lebih cenderung merefleksikan keputusan politik atau birokrasi yang amat pragmatis (berjangka pendek), tergantung situasi dan jauh dari pertimbangan yang analitis. Akibatnya, kebijakan dapat berubah-ubah tanpa memperdulikan mengapa harus diganti dan seterusnya (Kiesler, 1980). Itulah hal utama yang menjadikan hubungan intim antara kebijakan publik dan psikologi di Indonesia maupun di tempat-tempat lain tidak berjalan mulus.

Kebijakan publik di Indonesia

Dengan mempergunakan perspektif yang lebih luas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa tidak hanya psikologi yang kurang memperhatikan bidang kebijakan publik ini. Menurut Amir Santoso (1987), bahkan ilmuwan politik pun kurang memperhatikannya. Ada kemungkinan, kurangnya perhatian tersebut disebabkan kekhawatiran ilmuwan politik untuk terjebak dalam analisis mengenai struktur dan teknis seperti banyak terjadi dalam ilmu administrasi. Selain itu, masih menurut Amir Santoso, terdapat kekurangan informasi bahwa telaahan mengenai kebijakan publik bisa menyajikan analisis mengenai dinamika (individual), sosial, ekonomi dan politik, yang sebenarnya merupakan tuntutan ilmu politik pula.

Pada dasarnya, itulah yang terjadi. Setiap kebijakan publik sebenarnya dihasilkan melalui pergulatan antar berbagai kekuatan (yang mewakili berbagai kepentingan) yang berlangsung pada tataran formal

maupun non-formal. Sehingga, kembali bila membicarakan dimana kontribusi psikologi dapat ditujukan, sebenarnya dapat berlangsung dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik maupun kebijakan publik itu sendiri sebagai produk yang dihasilkannya.

Bila pergulatan tersebut berlangsung pada tataran formal, itulah yang disebut proses politik yang berlangsung dalam lembaga-lembaga politik (seperti DPR atau DPRD). Hal itu terjadi saat lembaga-lembaga politik tersebut mengkonsensuskan suatu pilihan kebijakan diantara berbagai kepentingan yang berbeda sebagaimana direpresentasikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Demikian pula bilamana itu terjadi dalam lembaga pembuat kebijakan publik (yakni instansi-instansi pemerintah), yakni saat mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel menuju ditentukannya suatu kebijakan tertentu.

Namun demikian, setiap ilmuwan yang percaya bahwa proses politik (lebih khusus lagi, proses pembuatan kebijakan publik) juga dipengaruhi oleh kultur, nilai dan tata-cara setempat, perlu mengakui bahwa pergulatan juga terjadi pada tataran non-formal. Pada tataran tersebut, berbagai praktek mulai dari aktivitas jamuan makan, pengiriman nota atau *kattebeletje*, kegiatan kunjung-mengunjungi, pengiriman bingkisan, pemberian uang saku, arisan ibu-ibu, percakapan di lapangan golf bahkan cumbu suami-istri menjelang tidur dan lain sebagainya, pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari proses non-formal tersebut.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dapat berlangsung proses negosiasi yang subtil, proses pencapaian konsensus yang amat simbolik, demikian pula proses pencapaian keputusan yang bersifat personal atau malah kultural. Ketiga proses tersebut jelas sulit ditemukan dalam literatur akademis barat

mengenai proses pembuatan kebijakan publik, namun itulah yang senyatanya terjadi di Indonesia. Hal mana, efektivitasnya (dalam arti kemampuan mempengaruhi kebijakan, bahkan membuat kebijakan yang tak direncanakan) boleh jadi lebih tinggi ketimbang apa yang berlangsung pada tataran formal.

Kemungkinan, kenyataan bahwa hidupnya proses di level non formal itulah yang beberapa kali menjadikan publik terkaget-kaget menghadapi munculnya kebijakan tertentu yang kemudian disebut sebagai mengejutkan, kontroversial, melawan arus, menentang opini umum, tidak bersahabat, melawan teori, aneh, tidak populer dan sebagainya. Walaupun pendapat umum dan opini publik belum tentu selalu benar, dan belum tentu pula kebijakan yang disebut tak bersahabat atau yang lainnya itu salah, nyatanya, ada hal yang memang tidak "nyambung" atau tidak tepat.

Ketidaktepatan tersebut boleh jadi terdapat dalam fase yang amat *crucial* dalam *setting* sosial masyarakat Indonesia yakni fase pelibatan publik dalam rangka formulasi kebijakan (*public engagement toward public policy formulation*), demikian pula fase pelibatan publik dalam rangka sosialisasi kebijakan (*public engagement toward policy socialization*).

Dalam masyarakat yang tengah berubah dewasa ini, para pembuat kebijakan (cq. Pemerintah) tidak dapat lagi menganggap sebagai yang paling mengetahui perihal apa yang diperlukan oleh publik dan, berdasarkan anggapan itu, menentukan dan memutuskan berbagai kebijakan yang lalu berdampak tertentu serta besar pada masyarakat. Tidak adanya keinginan dan upaya guna mengkonsultasikan segala sesuatunya bersama masyarakat melalui berbagai mekanisme, demikian pula tidak adanya upaya mengajak masyarakat melakukan pengenalan,

dapat berakibat penolakan kebijakan tersebut.

Ketika UU Pemulihan Keadaan Bahaya ditolak masyarakat pada 2001 dan menyebabkan pemerintah tidak lagi berkehendak memasukkan ulang ke DPR untuk dibicarakan kembali, persoalannya jelas terdapat pada pengkomunikasian yang tidak memadai. Contoh lain, opini yang telah terbentuk dan kemudian menolak pencantuman Pasal 19 dalam RUU TNI tentang keputusan militer untuk bertindak tanpa mengkonsultasikan sebelumnya kepada presiden walau dalam situasi mendesak, adalah contoh yang lain dari suatu proses pelibatan publik yang amat minim.

Adakah yang bisa dilakukan oleh psikologi dalam proses-proses tersebut? Sebenarnya ada. Apalagi, bila berbicara tentang apa yang bisa dilakukan dalam rangka isi atau bentuk kebijakan.

Hingga kini, masalah harga BBM, misalnya, selalu mengundang kontroversi. Demikian pula persoalan penanganan wilayah konflik seperti Aceh dan Papua maupun masalah otonomi daerah yang konon memindahkan sumber korupsi. Belum lagi persoalan penanganan lalu-lintas di Jakarta, masalah sampah, reklamasi pantai demikian pula masalah pendidikan dasar yang gratis namun berkualitas, yang merupakan masalah-masalah mendasar yang selalu menghadirkan dua dimensi (yakni 'setuju' dan 'tidak setuju').

Persetujuan ataupun ketidaksetujuan tersebut, nampaknya, tidaklah dalam hal bahwa orang tidak setuju hidup bersih atau tidak setuju pendidikan dasar yang berkualitas, namun debat lebih banyak berada di tataran bentuk kebijakan yang dipilih dan strategi yang dipakai. Sekali lagi, mestinya, psikologi turut berperan.

Daftar Pustaka

- Allen , T. Harrell, 1978, *New Methods in Social Science Research: Policy Sciences and Future Research*, Praeger Publishers N.Y.
- Brigham, J. & Brown, D.W. (eds.), 1980, "Introduction" dalam, *Policy Implementation: Penalties or Incentives?*, Beverly Hills: Sage Publ.
- Kiesler, C.A. 1980, Psychology and Public Policy, in *Applied Social Psychology Annual*, vol. 1, Leonard Bickman (ed.), Sage Publ. London
- Pettigrew, T.F., 1985, "Can social scientists be effective actors in the policy arena?", dalam Shortland, R.L. & Mark, M.M. (eds.), *Social Science and Social Policy*, Beverly Hills: Sage Publ.
- Santoso, A.. 1987, Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, *Jurnal Ilmu Politik* no. 3
- Ulmann, L.P., Rehm, L.P., Kasschau, R.A. (eds.), 1984, "Foreword: Research in social context", in *Psychology Research, Public Policy and Practice*, N.Y.: Praeger Special Studies
- Walker, W.E. 1994., The Policy Analysis Approach to Public Decisionmaking, *unpublished paper*, RAND/European-American Center for Policy Analysis